

Sebenarnya agak sulit membayangkan Pasukan Brimob yang begitu terlatih bisa berada dalam situasi seperti yang dialami unit yang berangkat menangani demo mahasiswa Universitas Cendrawasih di Abepura, minggu lalu, tanpa disertai peleton tindak dan mobil perintis water canon, 200 pasukan Brimob menghadapi ribuan pendemo yang sudah siap dengan senjata tajam dan batu-batuan.

DITAMBAH lagi dengan posisi jalan yang rendah dan terbuka, menjadikan pasukan Brimob sasaran empuk. Untung mereka masih memakai rompi, helm, dan membawa tameng, jika tidak, itu betul-betul neraka.

Alhasil, lewat setting itu, jatuhnya tiga nyawa anggota Brimob serta seorang anggota TNI-AU, demikian pula puluhan petugas lainnya yang terluka, adalah harga yang walau kelewat mahal, tetapi wajar terjadi. Pertanyaannya, apakah itu keteledoran atau harga dari sebuah pilihan kebijakan?

Keteledoran.

Pengendalian massa sejauh ini dimengerti sebagai sebuah metode yang harus disertai keterampilan dan dukungan sumber daya manusia serta peralatan yang memadai. Hitung-hitungannya jelas, untuk mengendalikan massa dengan karakter tertentu yang dilakukan metode dan perkuatan yang tertentu pula. Umumnya, guna mengendalikan massa anarki, diperlukan perkuatan dua kali



Dilema Model Perpolisian Bertahan

Oleh : Adrianus Meliala

Kriminolog UI, Penasehat Ahli Kapali

lebih besar dari jumlah massa. Memang pernah ada, situasi yang terjadi justru sesuatu yang anti-teori. Ketika barisan negoisator yang terdiri dari Polwan dikerahkan guna menjadi barisan terdepan menghadapi demonstran, itulah situasi antiteori tersebut. Polwan yang bisa diasumsikan lebih lemah, malah disuruh maju bernegoisasi. Ini terjadi di Polda Metro Jaya. Konon, keberhasilan mengendalikan demonstran cukup tinggi dicatat lewat implementasi strategi itu.

Namun diluar itu, pengendalian massa adalah pekerjaan serius yang tidak bisa ditangani setengah-tengah. Hal itu bisa dimaklumi mengingat resikonya, jatuhnya korban, tidak hanya dipihak demonstran, atau masyarakat, bahkan bisa menimpa petugas. Belum lagi dengan ancaman pelanggaran HAM, apabila terjadi

kesalahan saat menghadapi massa. Dalam kaitan itu, tidak berangkat menuju lokasi pada dasarnya suatu tindakan professional juga, apabila resources yang ada memang tidak atau belum mendukung dalam rangka mengendalikan demonstran. Untuk Indonesia, dalam banyak hal, situasi itu tidak pernah terjadi. Walaupun komposisi pasukan tidak lengkap (misalnya aparat pembawa gas air mata tidak ada) atau jumlah pasukan terlalu kecil (misalnya hanya ada satu, dua peleton), lagi pula tidak atau belum didukung oleh kendaraan perintis, aparat harus tetap berangkat.

Saat di lapangan, umumnya mereka akan berupaya bertahan dengan berbagai cara sambil menunggu perkuatan datang. Dengan kata lain, pengiriman satuan Brimob ke Abepura, dan Polisi telah mulai berpikir untuk

melakukan tindakan tegas, ternyata perintah untuk menembak bisa saja tidak turun juga. Ada kabar, pimpinan Polda Papua yang sempat dihubungi komandan lapangan tetap memerintahkan untuk tidak menembak betapapun sudah ada anggota yang roboh diterjang panah.

Bertahan

Mengapa pimpinan Polda Papua begitu konservatif, jelas berhubungan dengan kebijakan umum Polri yang memakai strategi 'bertahan' dalam menghadapi dinamika sosial politik di Papua. Brimob, misalnya, menarik mundur lebih dari setengah kekuatannya di Papua. Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) yang ada di Polres-Polres maupun satuan Brimobda sendiri juga dilarang membawa senjata tajam, paling maksimal membawa pentungan, saat bertugas mengendalikan massa. Abepura telah berkali-kali menjadi lokasi kepolisian setempat amat kerepotan. Pertama, ketika terjadi penyerangan terhadap kantor Polsek dan dilanjutkan dengan sweeping oleh anggota Brimobda. Kasus itu, berakhir dengan tuduhan pelanggaran HAM berat atas Brigjen Johny Wainal Usman, Waka Korbrimob sekarang. Insiden selanjutnya, ketika kepolisian mengamankan situasi di Pengadilan Negeri Abepura, 2005, saat itu masyarakat yang memprotes jalannya persidangan kemudian mengamuk. Polisi menghajar dan mengejar-pengejar pendemo itu ramai diliput pers dan menjadi berita yang tidak mengenakan kalangan kepolisian.

Situasi terakhir di Papua memang bak bara dalam sekam. Belum selesai dengan gonjang ganjing Pilkada di Irian Jaya Barat dan Papua, kasus ketidakpuasan PT. Freeport pun mencuat. Pada hal, ketidakpuasan terkait penampilan Majelis Rakyat Papua dan UU Otonomi Khusus Papua juga belum mereda. Menyadari itu, Kapolri

Sutanto pernah memerintahkan agar jangan sampai jatuh korban dikalangan demonstran. Hal yang akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu guna dijadikan martir dalam rangka mempertinggi semangat pergolakan di wilayah tersebut. Mungkin, ada yang tidak diucapkan dalam perintah Kapolri tersebut, yakni lebih baik anggota Polri yang terbunuh dari pada ada demonstran mati di tangan Polisi. Sayang, sekali, yang tidak diucapkan itulah yang malah sungguh-sungguh terjadi.

Perpolisian bertahan.

Secara teoritik, apa yang terjadi dengan penampilan Polisi di Papua cocok dengan apa yang disebut model perpolisian bertahan

Apabila suatu jajaran Kepolisian mengimplementasikan model Perpolisian bertahan, yang dioptimalkan adalah fungsi-fungsi Kepolisian yang menghindari kontak langsung dengan massa. Fungsi tersebut adalah Intelijen Kepolisian.

(*Defensive Policing Model*). Yakni, sebagai suatu cara Kepolisian mencapai atau mempertahankan kondisi tertib hukum dengan cara mereduksi kemampuan, mengurangi aktivitas, dan memantangkan langkah ofensif.

Mengapa model ini diambil di Papua, kita semua sudah bisa memahaminya. Masalahnya, selalu terdapat dilema yang mengiringi pengimplementasian strategi ini. Dilema tersebut dapat diibaratkan dengan ungkapan maju kena mundur juga kena.

Dikatakan "**mundur kena**

maju kena", karena Polri yang sudah dibuntungi kekuatannya, tentu otomatis akan lebih banyak berada di Markas. Pada saat masyarakat mempersepsi Polri seharusnya sudah bertindak, Kepolisian sendiri bisa jadi masih tenang-tenang di Markas. Tampaknya, itulah yang bisa menjelaskan mengapa Polri baru turun ke Abepura setelah masyarakat yang terganggu dengan demonstrasi mahasiswa ramai-ramai menelepon kantor Polisi. Betapapun pengkondisian demonstrasi di depan Kampus Universitas Cendrawasih telah berlangsung satu-dua hari sebelumnya.

Kelemahan

Meski demikian, dalam rangka menjalankan model Perpolisian bertahan ini, Polda Papua tampaknya tidak konsisten. Sehingga, alih-alih sebagai strategi, pemilihan model ini malah membuat jajaran Polda Papua tampak kedodoran. Kembali ke teori, apabila suatu jajaran Kepolisian mengimplementasikan model Perpolisian bertahan, yang dioptimalkan adalah fungsi-fungsi Kepolisian yang menghindari kontak langsung dengan massa. Fungsi tersebut adalah Intelijen Kepolisian.

Dalam hal inilah Polisi terlihat amat tidak siap. Ketidaksiapan itu terlihat dari sudut tidak adanya kontribusi intelijen guna menandai adanya kemungkinan insiden di Abepura tersebut. Sebagaimana diketahui, demo tersebut sebetulnya telah digalang sejak beberapa waktu sebelumnya. Apabila ada informasi dari intelijen bahwa mahasiswa telah mempersiapkan batu dan lain-lain, tentunya tidak akan ada Polisi yang tewas.

Di kalangan Satuan Brimob, sama saja soalnya. Satuan ini juga mengenal satuan intelijen yang mestinya digerakkan sebelum pasukan pemukul sampai di lapangan. Tampaknya, satuan itu juga tidak bekerja baik sehingga rekan-rekan mereka sendiri mesti bergelimpangan.***